

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Korea Selatan dan Jepang, serta Korea Utara, merupakan negara-negara di Asia Timur yang memiliki sejarah, budaya, dan isu politik yang kompleks. Isu utama yang menyertainya meliputi masalah keamanan regional, pertumbuhan ekonomi, dan hubungan diplomatik. Pertentangan antara Korea Selatan dan Jepang seringkali berpusat pada masalah sejarah dan hak asasi manusia, sementara Korea Utara memiliki reputasi sebagai negara rezim yang sangat tertutup dan memiliki program nuklir.

Perkembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara bukanlah persoalan baru di dunia Hubungan Internasional. Dalam mempertahankan keamanan nasionalnya, Korea Utara memutuskan untuk melaksanakan peningkatan senjata mematikan nuklir. Arms Control Association mencatat bahwa “Korea Utara saat ini diperkirakan memiliki 20-30 hulu ledak per Juni 2019, dan bahan fisil untuk sekitar 30-60 senjata nuklir. Hal tersebut memungkinkan Korea Utara akan memiliki sebanyak 20-100 hulu ledak pada tahun 2020”. Senjata nuklir merupakan senjata yang dibilang dapat menjadi ancaman terbesar bagi dunia. Oleh karena itu, pemilikan senjata nuklir di suatu negara akan menjadi ancaman bagi negara-negara disekitarnya terutama pada kawasan Asia Timur khususnya Korea Selatan dan Jepang (Arms Control Association, 2018).

Korea Selatan dan Jepang menjalin relasi yang tergolong kompleks serta memiliki sejarah yang panjang juga berliku. Dari sejarah perang dan kolonialisme

hingga masalah masa kini seperti hak asasi manusia dan isu lingkungan, hubungan kedua negara seringkali dipenuhi dengan tekanan dan tensi. Terlepas dari kurang baiknya hubungan antara negara Korea Selatan dan juga Jepang, perkembangan senjata mematikan nuklir Korea Utara merupakan salah satu ancaman yang sama menurut kedua negara tersebut. Perkembangan Nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dianggap sebagai suatu tindakan provokasi yang tentu saja mengancam bagi Negara Korea Selatan maupun Negara Jepang. Sehingga perkembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara ini secara tidak langsung menimbulkan keadaan *security dilemma* bagi kedua negara tersebut. Berikut perkembangan senjata nuklir Korea Utara :

Tabel 1.1 Ancaman Korea Utara tahun 2006-2016

No.	Waktu	Jenis Rudal/Nuklir	Lokasi	Keterangan
1.	04-05 Juni 2006	Rudal balistik jenis Taepo Dong-2, Scud-C, dan Nodong	Situs Uji Nuklir Kittaraeyong	Rudal Balistik Taepo Dong-2 gagal diluncurkan.
2.	9 Oktober 2006	Perangkat berbasis plutonium dengan perkiraan hasil 0,2-1 kiloton	Situs Uji Nuklir Punggye-ri di Provinsi Hamgyon Utara	Uji Coba nuklir Pertama
3.	25 Mei 2009	Perangkat berbasis plutonium dengan perkiraan hasil 2-8 kiloton	Mantapsan di sekitar Punggye-ri	Uji Coba nuklir kedua
4.	12 Desember 2012	Roket jarak jauh Unha-3	Stasiun Peluncuran Satelit Sohae	Peluncuran roket tersebut sukses dan satelit memasuki orbit
5.	12 Februari 2013	Perangkat berbasis plutonium dengan perkiraan hasil 6-9 kiloton	Mantapsan di sekitar Punggye-ri	Uji Coba nuklir ketiga

6.	26 Maret 2014	Rudal jarak menengah Rodang	Arah Laut Jepang	Hal tersebut melanggar sanksi PBB
7.	8 Februari 2015	Lima rudal balistik jarak pendek	Wonsan	Rudal terbang sekitar 125 mil timur laut ke laut
8.	6 Januari 2016	Bom hidrogen	Situs Uji Nuklir Punggye-ri di Provinsi Hamgyon Utara	Uji Coba nuklir keempat
9.	3 Agustus 2016	Rudal balistik jarak menengah jenis Nodong	Zona eksklusi ekonomi Jepang, sekitar 200 kilometer lepas pantai Jepang	-
10.	9 September 2016	10 kiloton TNT	Situs Uji Nuklir Punggye-ri di Provinsi Hamgyon Utara	Uji Coba nuklir kelima

Sumber : Data diolah peneliti 2023.

Pada tahun 2006, Korea Utara melaksanakan uji coba nuklir pertamanya lalu dilanjutkan dengan uji coba nuklir kedua pada tahun 2009, lalu pada tanggal 13 April 2012 Korea Utara meluncurkan rudal jarak jauh yang gagal (Ministry of Foreign Affairs, 2022). Provokasi Korea Utara ini memuncak ketika Korea Utara menembak kapal perang Korea Selatan Cheonan, menewaskan semua kru pada tahun 2010 (Cha, 2010). Lalu, pada tahun 2014 Korea Utara melepaskan

tembakan ke arah laut Jepang menggunakan beberapa peluncur roket, Korea Utara menembakkan tiga tembakan menggunakan sistem *Multiple Launch Rocket System* (MLRS), peluncur otomatis dengan mobilitas tinggi yang mampu menembakkan roket (Japan Times, 2014). Dengan uji coba nuklir keempat pada bulan Januari dan, setelah hanya 8 bulan, uji coba kelima pada bulan September, sambil meluncurkan 24 berbagai rudal balistik yang mengancam kawasan Asia Timur Korea Utara masih melancarkan serangkaian provokasi mengenai senjata nuklirnya sampai tahun 2016. (Ministry of Foreign Affairs, 2022). Pada tahun 2016, Korea Utara melaksanakan uji coba nuklir berturut-turut, ditambah dengan sekitar dua puluh peluncuran uji coba rudal termasuk *submarine-launched ballistic missile* (SLBM). Dihadapkan dengan situasi keamanan yang parah ini, Ministry of National Defense Korea Selatan melakukan tinjauan komprehensif atas kemampuan melawan ancaman nuklir dan misil Korea Utara, memeriksa perlunya memperkuat postur respons angkatan bersenjata Korea Selatan. Strategi pencegahan bersama dan melanjutkan proyek pembangunan sistem tiga sumbu, sampai pada kesadaran bahwa GSOMIA dengan Jepang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan intelijennya (Ministry of National Defense Republic of Korea, 2017). Perkembangan senjata mematikan nuklir Korea Utara yang menyebabkan munculnya kekhawatiran yang dialami oleh negara Jepang tidak dapat dipisahkan dari pengalaman mengerikan Jepang mengenai hancurnya negara Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang mengalami berbagai penderitaan diantaranya yaitu kerusakan fisik mutlak, bencana kemanusiaan, rusaknya perekonomian serta polusi kimia pasca penyerangan yang masih dapat dirasakan hingga masa kini (Gumay, 2016). Efek dari adanya ancaman perkembangan

senjata mematikan nuklir Korea Utara ini menyebabkan negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur memprediksi isu-isu yang dapat merugikan negara mereka, terutama Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara tersebut menjadikan isu perkembangan senjata nuklir Korea Utara ini sebagai suatu urgensi di bidang keamanan masing-masing negaranya sehingga hal tersebut membuka peluang kerjasama militer antar dua negara.

General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) merupakan suatu perjanjian internasional dimana pada dasarnya secara hukum sifatnya mengikat, perjanjian ini memberikan persyaratan yang dibuat untuk penanganan dan perlindungan informasi militer rahasia yang diberikan oleh suatu Negara ke Negara yang lain. Perjanjian ini pada awalnya diusulkan oleh Jepang pada tahun 1989. Namun, pada saat itu, para pihak tidak dapat menyepakati perlunya atau kegunaan GSOMIA. Kemudian kedua negara menunjukkan minat baru pada GSOMIA dalam menghadapi provokasi berulang Korea Utara dalam peluncuran rudal jarak jauh dan uji coba senjata nuklir pada tahun 2006 dan 2009. Kemudian, pada tahun 2011, menteri pertahanan negara tersebut sepakat untuk memulai negosiasi GSOMIA. Kemudian pada Juni 2012, GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang dibahas dalam sebuah rapat kabinet. Namun, proses tersebut dihentikan pada tahap akhir, tepat sebelum kesepakatan dapat ditandatangani, karena adanya penolakan terhadap aspek prosedural dari negosiasi GSOMIA. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2016 oleh Korea Selatan dan Jepang, dengan tujuan untuk membantu masing-masing negara dalam memerangi ancaman *cyber* dan mempertahankan informasi penting. Fokus utama dari perjanjian ini adalah pada “perlindungan” informasi. Perjanjian tersebut

menetapkan bahwa meskipun informasi rahasia dikomunikasikan kepada pihak lain, informasi tersebut tidak akan diteruskan kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan pihak lain, dan orang yang akan menangani informasi tersebut akan dibatasi. Secara spesifik dapat dikatakan bahwa GSOMIA merupakan bentuk dari perjanjian militer yang dilakukan dengan metode berbagi informasi penting dapat berupa kode, strategi, teknologi sistem *code-deciphering* atau *cryptographic*. Jika perang pecah, kerjasama GSOMIA dapat memberikan izin kepada masing-masing negara untuk saling membagikan informasi yang relevan satu sama lain untuk mengembangkan strategi perang bersama (Jun, 2012).

Kerjasama Korea Selatan dan Jepang melalui GSOMIA ini dipercaya merupakan suatu respon *security dilemma* atas perkembangan senjata nuklir Korea Utara. *Security Dilemma* didefinisikan sebagai situasi di mana tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri menyebabkan reaksi dari negara lain, yang mengarah pada penurunan dan bukannya peningkatan keamanan negara tersebut. Jepang dan juga Korea Selatan pada dasarnya tidak mengetahui apakah di masa depan Korea Utara yang telah mempersenjatai negaranya akan menggunakan senjata tersebut kepada Negara mereka. Situasi tersebut merupakan suatu alasan Korea Selatan dan Jepang memutuskan untuk membuat suatu kesepakatan dengan tujuan untuk mencegah Korea Utara menggunakan senjata yang menyebabkan terganggunya keseimbangan keamanan (Anders, 2011).

Kerjasama ini pada faktanya tidak berjalan dengan mulus, bahkan Korea Selatan sempat menunda untuk melanjutkan kersama dengan Jepang tersebut akibat adanya penolakan yang dilakukan oleh dua golongan dari pihak Korea

Selatan yang menolak perjanjian GSOMIA ini yaitu golongan liberal dan golongan konservatif. Golongan liberal ini terdiri dari kumpulan generasi muda yang turut menolak dilanjutkannya kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang ini diakibatkan oleh ketidakpercayaan mereka kepada pemerintahan Korea Selatan. Sedangkan golongan konservatif terdiri dari para kelompok solidaritas dari isu *comfort women* dimana isu tersebut muncul dilatarbelakangi oleh sejarah antara Korea Selatan dan Jepang yang tidak cukup baik, dimana pada masa PDII terdapat sekitar 20.000 wanita Korea Selatan yang dipaksa untuk menjadi budak seksual melayani para pertempur militer Jepang (Dutta, 2022). Para golongan konservatif tidak menyetujui kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang melalui GSOMIA tersebut disebabkan oleh salah satu alasan yang telah dipaparkan.

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis mengidentifikasi masalah bahwa adanya keadaan *security dilemma* akibat dari perkembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara menyebabkan Korea Selatan dan Jepang harus saling mengesampingkan *historical background* antara kedua Negara tersebut untuk melakukan kerjasama yang bertujuan untuk saling tukar informasi mengenai perkembangan senjata mematikan nuklir Korea Utara.

Korea Selatan dan Jepang mengalami keadaan *security dilemma* akibat satu kecemasan yang sama yaitu perkembangan senjata nuklir Korea Utara. Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan yaitu adanya persamaan persepsi ancaman antara Korea Selatan dan Jepang mengenai senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara sehingga memunculkan keadaan *security dilemma*, sehingga penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah

penelitian yang berjudul *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) Jepang-Korea Selatan sebagai Respon Security Dilemma akibat Perkembangan Nuklir Korea.*

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya dimana akibat keputusan Korea Utara mengembangkan senjata militer berupa nuklir yang mengakibatkan Negara yang berada di kawasan yang sama yaitu kawasan Asia Timur khususnya Korea Selatan dan Jepang memunculkan persepsi ancaman yang sama, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana Implementasi Perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang terhadap Ancaman Senjata Mematikan Nuklir Korea Utara?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan yaitu adanya keadaan *security dilemma* akibat dari perkembangan serta peningkatan senjata nuklir Korea Utara sehingga menyebabkan Korea Selatan dan Jepang harus saling mengesampingkan *historical background* antara kedua Negara tersebut untuk melakukan kerjasama yang bertujuan untuk saling tukar informasi mengenai perkembangan senjata nuklir Korea Utara, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada bagaimana sebuah keadaan *security dilemma* dapat memengaruhi negara Korea Selatan dan Jepang yang berlatar belakang sejarah kurang baik dapat melakukan kerjasama akibat kecemasan perkembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea

Utara. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan senjata nuklir Korea Utara dapat mempengaruhi negara-negara lain.
2. Untuk mengetahui keadaan *security dilemma* yang dialami oleh negara Korea Selatan dan Jepang menyebabkan terjalinnya kerjasama militer.
3. Untuk lebih memahami bagaimana isi dari perjanjian GSOMIA.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumber pengetahuan dan informasi, khususnya dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.
2. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.